

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 5 NO. 1, JUNI 2014

ISSN: 2086-6313

**KONDISI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA DALAM
MENGHADAPI GLOBALISASI**

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

**UPAYA INDONESIA MENGHADAPI MIGRASI TENAGA KERJA
DALAM KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (KEA) 2015**

Yuni Sudarwati

**PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI TENAGA KERJA DAN ANALISIS
MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) DALAM MENGELOMPOKKAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI BERBAGAI PROVINSI**

Edmira Rivani

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN MORATORIUM PEMBUKAAN HUTAN ALAM PRIMER
DAN LAHAN GAMBUT:
STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN SULAWESI TENGAH**

Hariyadi

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK UREA DAN TSP TERHADAP
PRODUKSI PADI DAN CAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI INDONESIA**

Iwan Hermawan

DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

Rafika Sari

NON PERFORMING LOANS SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA

Rasbin

KEBIJAKAN REALOKASI GAS BUMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Gusti Azis, Hermanto Siregar, Adler H. Manurung, dan Evita H. Legowo

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 5 NO. 1, JUNI 2014

ISSN: 2086-6313

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v-vii
Abstrak	ix-xvi
KONDISI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI	
<i>Sahat Aditua Fandhitya Silalahi</i>	1-13
UPAYA INDONESIA MENGHADAPI MIGRASI TENAGA KERJA DALAM KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (KEA) 2015	
<i>Yuni Sudarwati</i>	15-28
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI TENAGA KERJA DAN ANALISIS MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) DALAM MENGELOMPOKKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI BERBAGAI PROVINSI	
<i>Edmira Rivani</i>	29-41
PELAKSANAAN KEBIJAKAN MORATORIUM PEMBUKAAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT: STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN SULAWESI TENGAH	
<i>Hariyadi</i>	43-61
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK UREA DAN TSP TERHADAP PRODUKSI PADI DAN CAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI INDONESIA	
<i>Iwan Hermawan</i>	63-78
DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA	
<i>Rafika Sari</i>	79-99
NON PERFORMING LOANS SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA	
<i>Rasbin</i>	101-111
KEBIJAKAN REALOKASI GAS BUMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA	
<i>Gusti Azis, Hermanto Siregar, Adler H. Manurung, dan Evita H. Legowo</i>	113-130
Pedoman Penulisan	

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KATA PENGANTAR

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP) hadir kembali di hadapan pembaca yang budiman dalam Volume 5 Nomor 1 Juni 2014. Jurnal ini menyajikan tulisan mengenai isu ekonomi yang sangat berkaitan dengan kebijakan publik. Topik tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan topik yang sangat menarik untuk dibaca sebagai bahan informasi yang dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia saat ini. Harapannya dari tulisan yang beragam ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan nasional.

Tulisan pertama dalam Jurnal ini berjudul “Kondisi Industri Manufaktur Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi” ditulis oleh Sahat Aditua F. Silalahi. Penulis melihat bahwa industri manufaktur memegang peranan penting di dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berbasis kondisi dalam industri manufaktur menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian kepada tiga catatan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi manufaktur di Indonesia, yaitu (1) peran teknologi dan infrastruktur dalam membangun ketahanan manufaktur terhadap krisis ekonomi, (2) aglomerasi industri yang telah mendorong terwujudnya kawasan industri, dan (3) fenomena “*missing middle*” yang mengindikasikan terdapat permasalahan yang menghambat perkembangan industri manufaktur secara organik.

Tulisan kedua dengan judul “Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015” yang ditulis oleh Yuni Sudarwati. Dalam tulisannya penulis melihat bahwa Indonesia perlu menyiapkan diri dalam menyambut pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada tahun 2015, terutama terkait sumber daya manusia (SDM). Cetak biru KEA menyepakati pembebasan arus tenaga kerja ahli terbatas sampai tahun 2020. Setelah itu, baik tenaga kerja ahli maupun kurang ahli, bisa melakukan migrasi dengan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Sementara pada saat yang sama kondisi tenaga kerja Indonesia masih kurang bersaing di luar negeri maupun untuk bersaing menghadapi serbuan tenaga kerja asing. Tulisan ini disusun untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini dan upaya yang seharusnya dilaksanakan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai teori-teori tentang migrasi internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa memang kondisi tenaga kerja Indonesia belum berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan upaya yang tepat untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Indonesia sehingga mempunyai daya saing dan siap menghadapi KEA tahun 2015.

Tulisan ketiga berjudul “Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi” yang ditulis oleh Edmira Rivani. Penulis melihat bahwa struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis struktur ekonomi dan pergeseran peranan sektor ekonomi terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor industri namun tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian semakin berkurang sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor industri semakin bertambah selama tahun 2010-2013. Tulisan ini menggunakan alat analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) untuk menggali informasi tentang suatu kemiripan (*similarity*) sehingga terlihat kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam menyerap tenaga. Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Babel, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua, sedangkan sektor manufaktur adalah sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan sinyal kemajuan pembangunan, yang didukung dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang meningkat, serta adanya tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia.

Tulisan keempat dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Moratorium Pembukaan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut” yang ditulis oleh Hariyadi. Penulis melihat bahwa kebijakan penundaan pemberian izin baru pembukaan hutan alam dan lahan gambut berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 adalah sebuah terobosan kebijakan dalam rangka tata kelola sektor kehutanan secara terencana, terukur, dan merespon peran aktif Indonesia dalam penurunan gas rumah kaca (GRK) secara global. Studi dengan metode kualitatif berbasis sumber data primer dan sekunder yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Tengah, ditujukan untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan kebijakan moratorium yang hanya berjalan selama dua tahun. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan melihat dari sejumlah parameter seperti rentang waktu, dasar hukum, dukungan semua pemangku kepentingan, dan capaian, kebijakan moratorium tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks besarnya persoalan pengelolaan tata kelola kehutanan dan terbatasnya kemauan politik pemerintah dalam menggalang dan memobilisasi dukungan semua pemangku kepentingan serta segenap instrumen implementasi kebijakan, penguatan orientasi kebijakan moratorium yang berbasis *output* dan dengan dasar hukum yang lebih kuat menjadi prasyarat penting keberhasilan kebijakan moratorium ke depan. Dalam konteks ini, perpanjangan kebijakan moratorium selama dua tahun berikutnya sampai tahun 2015 menjadi penting untuk dioptimalkan pelaksanaannya.

Tulisan kelima dengan judul “Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia” ditulis oleh Iwan Hermawan. Penulis melihat bahwa salah satu isu penting dalam Konferensi para menteri anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kesembilan di Bali pada Desember 2013 adalah kebijakan pemberian subsidi pertanian yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Dampak kebijakan subsidi pupuk masih diperdebatkan hingga saat ini. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi dan capaian swasembada pangan, khususnya padi. Untuk menjawab tujuan penelitian maka digunakan pendekatan ekonometrika 2SLS dengan membangun model ekonomi padi Indonesia. Transmisi kebijakan subsidi pupuk kepada ekonomi padi dikonstruksikan secara simultan dinamis. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* dari tahun 1990 hingga tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan jika kebijakan kenaikan subsidi pupuk sesuai dengan kesepakatan Paket Bali dapat meningkatkan areal panen, produksi, dan produktivitas padi sehingga swasembada padi berkelanjutan tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, ketika subsidi pupuk dicabut maka swasembada padi akan gagal diwujudkan, baik pada periode tahun 2014 hingga tahun 2017. Hal ini menunjukkan peran penting harga pupuk sebagai insentif berproduksi padi di Indonesia. Kebijakan harga *output*, baik harga gabah maupun harga beras, juga belum mampu meredam penurunan produksi padi tersebut. Opsi kebijakan penghapusan pupuk secara bertahap dapat dipilih oleh pemerintah guna mengurangi beban fiskal asalkan dibarengi dengan perkembangan sektor-sektor lainnya seperti infrastruktur dan logistik.

Tulisan keenam berjudul “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia” yang ditulis oleh Rafika Sari. Penulis menyampaikan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk memberikan peran dan kemandirian daerah lebih dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen transfer daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal daerah. Tujuan dari studi ini adalah mengetahui kondisi desentralisasi fiskal daerah tertinggal di Indonesia dan hubungan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada periode tahun 2010-2012. Studi ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu rasio kemampuan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah tertinggal serta analisis kualitatif. Populasi yang digunakan dalam studi ini sebanyak 183 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2010-2012. Hasil studi menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal pada daerah tertinggal sangat rendah, dan meningkatnya alokasi DAK pada daerah tertinggal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tulisan ketujuh dalam jurnal ini berjudul “*Non Performing Loans* Sektor Ekonomi di Indonesia” yang ditulis oleh Rasbin. Dalam tulisannya penulis menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan di tengah krisis yang melanda dunia, di mana sektor yang tumbuh adalah *non-tradable sector*. Di samping itu, kredit tahun 2013 mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti kredit ke sektor pertanian, sektor listrik, air dan gas, dan sektor konstruksi, sehingga sumbangan pertumbuhan kredit ke sektor-sektor tersebut mengalami penurunan. Di lain pihak, angka kredit macet/*non-performing loan* (NPL) masih menunjukkan peningkatan. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan menekan terjadinya NPL di sektor-sektor ekonomi. Tujuan utama tulisan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi NPL sektor-sektor ekonomi di Indonesia selama periode tahun 2005-2013. Analisis yang digunakan adalah

Dynamic Panel Data (DPD), yang meliputi estimasi *difference generalized method of moments (GMM)* dan *system GMM*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara NPL periode sekarang dan NPL periode sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa NPL tersebut bersifat persisten. Hasil empiris lainnya yang ditemukan dalam studi ini adalah adanya hubungan positif antara NPL dengan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi sektoral, tetapi efek dari pertumbuhan ekonomi sektoral tidak signifikan. Selain itu, studi ini juga menemukan adanya hubungan negatif antara NPL dan pertumbuhan kredit tersebut.

Dan tulisan kedelapan dari jurnal ini berjudul “Kebijakan Realokasi Gas Bumi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” yang ditulis oleh Gusti Azis, Hermanto Siregar, Adler H. Manurung, dan Evita H. Legowo. Gabungan penulis ini melihat bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia telah merubah tujuan pemanfaatan gas bumi, yaitu dari tujuan untuk penerimaan yang berorientasi untuk kebutuhan ekspor guna memperoleh devisa menjadi tujuan untuk pertumbuhan ekonomi dengan mencukupi kebutuhan gas bumi di dalam negeri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional dan menciptakan efek pengganda yang lebih besar. Kebijakan tersebut membawa dilema bagi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis perkembangan dan dinamika industri gas bumi, (2) menganalisis faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan gas bumi, dan (3) menganalisis dampak dari kebijakan ekonomi dan faktor-faktor ekonomi lainnya terhadap pemanfaatan gas bumi. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan pendekatan ekonometrika dengan metode 2SLS dan data *time series* tahun 2000-2011. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi produksi gas bumi adalah harga dunia gas bumi dan harga gas bumi Indonesia. Sedangkan respon ekspor gas bumi terhadap produksi gas bumi adalah elastis dalam jangka panjang, di mana hal ini menunjukkan perkembangan potensi sumber daya gas bumi mendorong ekspornya. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi permintaan gas bumi oleh PLN dan industri pupuk adalah bervariasi. Berdasarkan hasil simulasi kebijakan tahun 2012-2018 bahwa kebijakan realokasi gas bumi Indonesia mampu meningkatkan permintaan gas bumi domestik dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan lainnya, namun demikian kondisi ini menjadi disinsentif bagi pengembangan produksi gas bumi Indonesia.

Demikian sekilas pengantar dan gambaran dari tulisan-tulisan yang dimuat dalam edisi kali ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Riant Nugroho sebagai editor tamu yang telah banyak memberikan masukan yang berarti. Begitu pula dengan Prof. Dr. Rochadi yang memberikan pencerahan terhadap kesempurnaan jurnal kami. Besar harapan redaksi, tulisan-tulisan yang disajikan dalam jurnal edisi kali ini berguna dalam memperkaya pengetahuan bagi pembaca, terutama Anggota DPR RI yang terhormat dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya. Redaksi sangat terbuka atas saran dan masukan dari pembaca yang budiman, demi meningkatkan kualitas dari jurnal di masa mendatang. Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Juni 2014

Redaksi

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 5 NO. 1, JUNI 2014

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi (P3DI Setjen DPR-RI)

KONDISI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI

JEKP, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hal. 1-13

Abstrak

Industri manufaktur memegang peranan penting di dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berbasis kondisi dalam industri manufaktur menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian kepada tiga catatan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi manufaktur di Indonesia. Tiga catatan kebijakan tersebut adalah peran teknologi dan infrastruktur dalam membangun ketahanan manufaktur terhadap krisis ekonomi, aglomerasi industri yang telah mendorong terwujudnya kawasan industri, dan fenomena “*missing middle*” yang mengindikasikan terdapat permasalahan yang menghambat perkembangan industri manufaktur secara organik.

Kata kunci: manufaktur, industri, kebijakan, ekonomi

Yuni Sudarwati (P3DI Setjen DPR-RI)

UPAYA INDONESIA MENGHADAPI MIGRASI TENAGA KERJA DALAM KOMUNITAS EKONOMI (KEA) 2015

JEKP, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hal. 15-28

Abstrak

Indonesia perlu menyiapkan diri dalam menyambut pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada tahun 2015, terutama terkait sumber daya manusia (SDM). Cetak biru KEA menyepakati pembebasan arus tenaga kerja ahli terbatas sampai tahun 2020. Setelah itu, baik tenaga kerja ahli maupun kurang ahli, bisa melakukan migrasi dengan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Sementara pada saat yang sama kondisi tenaga kerja Indonesia masih kurang bersaing di luar negeri maupun untuk bersaing menghadapi serbuan tenaga kerja asing. Kajian dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini dan upaya yang seharusnya dilaksanakan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai teori-teori tentang migrasi internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa memang kondisi tenaga kerja Indonesia belum berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan upaya yang tepat untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Indonesia sehingga mempunyai daya saing dan siap menghadapi KEA 2015.

Kata kunci: migrasi tenaga kerja, migrasi internasional, Komunitas Ekonomi ASEAN

Edmira Rivani (P3DI Setjen DPR-RI)

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI TENAGA KERJA DAN ANALISIS *MULTIDIMENSIONAL SCALING* (MDS) DALAM MENGELOMPOKKAN PEYERAPAN TENAGA KERJA DI BERBAGAI PROVINSI

JEKP, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hal. 29-41

Abstrak

Struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur ekonomi dan pergeseran peranan sektor ekonomi terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor industri namun tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian semakin berkurang sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor industri semakin bertambah selama tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) yang merupakan suatu teknik untuk menggali informasi tentang suatu kemiripan (*similarity*) sehingga terlihat kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam menyerap tenaga. Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Babel, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua, sedangkan manufaktur adalah sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun dapat disimpulkan hal tersebut merupakan sinyal kemajuan pembangunan, yang didukung dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang meningkat, serta tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia.

Kata kunci: sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja, analisis *Multidimensional Scaling* (MDS)

Hariyadi (P3DI Setjen DPR-RI)

PELAKSANAAN KEBIJAKAN MORATORIUM PEMBUKAAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT: STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN SULAWESI TENGAH

JEKP, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hal. 43-61

Abstrak

Kebijakan penundaan pemberian izin baru pembukaan hutan alam dan lahan gambut berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 adalah sebuah terobosan kebijakan dalam rangka tata kelola sektor kehutanan secara terencana, terukur, dan merespon peran aktif Indonesia dalam penurunan gas rumah kaca (GRK) secara global. Studi dengan metode kualitatif berbasis sumber data primer dan sekunder yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Tengah, ditujukan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan moratorium yang hanya berjalan selama dua tahun. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dilihat dari sejumlah parameter seperti rentang waktu, dasar hukum, dukungan semua pemangku kepentingan, dan capaian, kebijakan moratorium ini belum mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks besarnya persoalan pengelolaan tata kelola kehutanan dan terbatasnya kemauan politik pemerintah dalam menggalang dan memobilisasi dukungan semua pemangku kepentingan serta segenap instrumen implementasi kebijakan, penguatan orientasi kebijakan moratorium yang berbasis output dan dengan dasar hukum yang lebih kuat menjadi prasyarat penting keberhasilan kebijakan moratorium ke depan. Dalam konteks ini, perpanjangan kebijakan moratorium selama dua tahun berikutnya sampai tahun 2015 menjadi penting untuk dioptimalkan pelaksanaannya.

Kata kunci: kebijakan moratorium, deforestasi, degradasi hutan, emisi GRK, implementasi kebijakan

Iwan Hermawan (P3DI Setjen DPR-RI)

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK UREA DAN TSP TERHADAP PRODUKSI PADI DAN CAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI INDONESIA

JEKP, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hal. 63-78

Abstrak

Salah satu isu penting dalam Konferensi para menteri anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kesembilan di Bali pada Desember 2013 adalah kebijakan pemberian subsidi pertanian yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Dampak kebijakan subsidi pupuk hingga saat ini masih diperdebatkan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi dan capaian swasembada pangan, khususnya padi. Untuk menjawab tujuan penelitian maka digunakan pendekatan ekonometrika 2SLS dengan membangun model ekonomi padi Indonesia. Transmisi kebijakan subsidi pupuk kepada ekonomi padi dikonstruksikan secara simultan dinamis. Jenis data yang digunakan merupakan data *time series* dari tahun 1990 hingga tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan jika kebijakan kenaikan subsidi pupuk sesuai dengan kesepakatan Paket Bali maka areal panen, produksi, dan produktivitas padi dapat meningkat sehingga swasembada padi tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, ketika subsidi pupuk dicabut maka swasembada padi akan gagal diwujudkan, pada periode tahun 2014 hingga tahun 2017. Hal ini menunjukkan peran penting harga pupuk sebagai insentif berproduksi padi di Indonesia. Kebijakan harga *output*, baik harga gabah maupun harga beras, belum mampu meredam penurunan produksi padi tersebut. Berdasarkan hasil temuan ini maka kebijakan subsidi pupuk masih diperlukan petani guna mencapai swasembada padi yang berkelanjutan. Di sisi lain kebijakan penghapusan pupuk secara bertahap juga dapat menjadi opsi ketika berhubungan dengan upaya mengurangi beban fiskal, asalkan dibarengi dengan perbaikan sektor-sektor pendukung lainnya, seperti infrastruktur dan logistik.

Kata kunci: Paket Bali, padi, kebijakan, subsidi pupuk, persamaan simultan

Rafika Sari (P3DI Setjen DPR-RI)

DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

JEKP, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hal. 79-99

Abstrak

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk memberikan peran dan kemandirian daerah lebih dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen transfer daerah yang mengatasi kesenjangan fiskal daerah. Semakin meningkatnya DAK sebagai tindakan afirmatif bagi daerah tertinggal seyogyanya memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan daerah tertinggal. Tujuan dari studi ini adalah mengetahui karakteristik keuangan dan kondisi desentralisasi fiskal daerah tertinggal di Indonesia, serta hubungan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada periode tahun 2010-2012. Dalam studi ini akan digunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah rasio kemampuan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggal, serta membandingkan pertumbuhan alokasi DAK per kapita dan pertumbuhan ekonomi per kapita daerah tertinggal. Populasi yang digunakan dalam studi ini adalah 183 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia pada tahun 2010-2012. Hasil studi menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal pada daerah tertinggal sangat rendah, dan meningkatnya alokasi DAK pada daerah tertinggal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, daerah tertinggal, DAK, dana transfer, pertumbuhan ekonomi

Rasbin (P3DI Setjen DPR-RI)

NON PERFORMING LOANS SEKTOR EKONOMI DI INDONESIA

JEKP, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hal. 101-111

Abstrak

Perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan di tengah krisis yang melanda dunia di mana sektor yang tumbuh adalah *non-tradable sector*. Disamping itu, kredit tahun 2013 mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti kredit ke sektor pertanian, sektor listrik, air dan gas, dan sektor konstruksi sehingga sumbangan pertumbuhan kredit ke sektor-sektor tersebut mengalami penurunan. Di lain pihak, angka kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) masih menunjukkan peningkatan. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan menekan terjadinya NPL di sektor-sektor ekonomi. Tujuan utama tulisan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi NPL sektor-sektor ekonomi di Indonesia selama periode tahun 2005-2013. Kami menggunakan *Dynamic Panel Data* (DPD) meliputi estimasi *difference generalized method of moments* (GMM) dan *system GMM*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara NPL periode sekarang dan NPL periode sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa NPL tersebut bersifat persisten. Hasil empiris lainnya yang ditemukan dalam studi ini adalah adanya hubungan positif antara NPL dengan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi sektoral tetapi efek dari pertumbuhan ekonomi sektoral tidak signifikan. Selain itu, studi ini juga menemukan hubungan negatif antara NPL dan pertumbuhan kredit.

Kata kunci: kredit macet, model dinamik, data panel, estimasi GMM

Gusti Azis (Institut Pertanian Bogor), Hermanto Siregar (Institut Pertanian Bogor),

Adler H. Manurung (Institut Pertanian Bogor), dan Evita H. Legowo (Swiss German University)

KEBIJAKAN REALOKASI GAS BUMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

JEKP, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, hal. 113-130

Abstrak

Pada tahun 2010 pemerintah merealokasi tujuan pemanfaatan gas bumi Indonesia, dari untuk memenuhi kebutuhan perolehan devisa ekspor menjadi untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri guna mendorong pertumbuhan produksi nasional dan menciptakan efek pengganda yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menciptakan situasi yang dilematis bagi pemerintah karena keberhasilan realokasi gas bumi belum teruji namun akan terjadi pengurangan devisa. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini untuk (1) menganalisis perkembangan dan dinamika industri gas bumi, (2) menganalisis faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh terhadap penawaran, dan permintaan gas bumi, dan (3) menganalisis dampak dari kebijakan ekonomi dan faktor-faktor ekonomi lainnya terhadap pemanfaatan gas bumi. Dalam rangka menjawab tujuan penelitian maka digunakan (1) analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama dengan hasil berupa gambaran umum kondisi perkembangan dan dinamika pasar gas bumi Indonesia dan rencana pemanfaatan gas bumi ke depan serta kendala-kendala peraturan dan regulasi pemerintah daerah yang dirasakan sekarang, dan (2) pendekatan ekonometrika dalam bentuk persamaan simultan untuk menjawab tujuan penelitian kedua dan ketiga. Pendekatan ekonometrika menggunakan metode *Two Stage Least Squares* (2SLS) dengan data runtun waktu tahun 2000-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku produksi gas bumi adalah harga gas bumi Indonesia dan harga gas bumi dunia. Respon ekspor gas bumi Indonesia terhadap produksi gas bumi yang elastis dalam jangka panjang menunjukkan potensi pengembangan sumber daya gas bumi dalam mendorong ekspor gas bumi Indonesia. Di sisi lain faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gas bumi oleh PLN dan industri pupuk urea berbeda-beda. Namun demikian subsidi menjadi kebijakan yang berpengaruh nyata dalam meningkatkan permintaan gas bumi oleh kedua industri tersebut. Berdasarkan hasil simulasi maka kebijakan realokasi gas bumi Indonesia mampu meningkatkan permintaan gas bumi domestik dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan lainnya, namun demikian kondisi ini menjadi disinsentif bagi pengembangan produksi gas bumi Indonesia.

Kata kunci: gas bumi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan realokasi, persamaan simultan

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 5 NO. 1, JUNE 2014

ISSN: 2086-6313

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi (P3DI Setjen DPR-RI)

MANUFACTURING INDUSTRY CONDITION IN INDONESIA AGAINST GLOBALIZATION

JEKP, Vol. 5 No. 1, June 2014, pp. 1-13

Abstract

Manufacturing industry plays an important role in Indonesian economy mainly due to its ability to produce tradable products and to create jobs. Therefore, policies which are formulated based on manufacturing industry condition becomes paramount, especially in relation to economic globalization. This study uses qualitative approach and the results are presented descriptively. This study concludes that government should pay attention to the three policy issues relating to manufacturing condition of Indonesia. They are technology and infrastructure role in developing manufacturing resistance from economic crisis, manufacturing industry agglomeration which has established the industrial estate, and "missing middle" phenomenon which indicates that there are some problems hindering the manufacturing industry growth organically.

Keywords: *manufacturing, industry, policy, economy*

Yuni Sudarwati (P3DI Setjen DPR-RI)

INDONESIA'S EFFORT IN LABOUR MIGRATION FACING ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

JEKP, Vol. 5 No. 1, June 2014, pp. 15-28

Abstract

Indonesia should prepare for the implementation of ASEAN Economic Community in 2015, especially in human resources area. AEC Blueprint states that in 2020 free flow of skilled and unskilled labour will be opened fully. After 2020, both of skilled and unskilled labour can migrate to all ASEAN regions. While the Indonesian labour quality is still far behind from any other ASEAN member countries members. This research aims to describe Indonesian labour condition and effort needed for labour development. Qualitative analysis with migration international theory was used to analyse Indonesian labour condition phenomenon. The result shows that Indonesian labour is still uncompetitive. Hence the right effort is needed to improve the quality and quantity of Indonesia labour to face AEC in 2015.

Keywords: *labour migration, international migration, ASEAN Economic Community*

Edmira Rivani (P3DI Setjen DPR-RI)

THE CHANGING IN ECONOMIC STRUCTURE OF EMPLOYMENT AND MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS IN GROUPING EMPLOYMENT ABSORPTION IN PROVINCES

JEKP, Vol. 5 No. 1, June 2014, pp. 29-41

Abstract

The structure of a nation's economy, among others, is reflected in the structure of employment. This research is aimed to analyze economic structure and the changing role of economic sectors especially in employment absorption. Employment absorption in agricultural sector is larger than in industry sector but employment absorbed in the agricultural sector decreases than in the industry sector during the year of 2010-2013. Analysis Multidimensional Scaling (MDS) is used for digging up information about similarity and it will show the ability of each sector of the economy in employment absorption. Analysis MDS shows that the agricultural sector absorbs the highest rate of employment in Provinces of Aceh, West Sumatera, Riau, Riau Island, Jambi, Bangka Belitung Island, Bengkulu, Bali, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Gorontalo, Central Sulawesi, West Sulawesi, Southeast Sulawesi, Maluku, and Papua, while the manufacturing sector absorbs the highest rate of employment in Provinces of East Java, Central Java, North Sumatera, and South Sulawesi. Based on the fact of declining amount of employment in the agricultural sector, it can be inferred as representing the development progress signal, supported by the increasing number of employment in manufacturing and services sector, and the trend of unemployment decline during recent years in Indonesia.

Keywords: economy sectors, employment absorption, Multidimensional Scaling (MDS)

Hariyadi (P3DI Setjen DPR-RI)

PEATLAND AND FOREST PERMIT MORATORIUM POLICY: STUDY IN CENTRAL KALIMANTAN AND CENTRAL SULAWESI PROVINCE

JEKP, Vol. 5 No. 1, June 2014, pp. 43-61

Abstract

A two-year suspension policy on all new concessions for conversion of peat and natural forest mandated by Presidential Decree No. 10 of 2011 (peat and forest permit moratorium) was a policy breakthrough targeted for a planned and measurable forestry governance, and responding to Indonesia's global active role in the greenhouse gases (GHGs) reduction. By using based-on primary and secondary data qualitative method conducted in the Provinces of Central Kalimantan and Central Sulawesi, this study is aimed to see how effective the permit moratorium was implemented for only two years. The study showed that to be viewed from several parameters such as the policy time frame, legal framework, the degree to which all stakeholders' support were given, and the actual policy output, the permit moratorium policy has not shown as expectedly as intended. Under the huge issue confronting to forestry governance and a weak political will of the government in harnessing all stakeholders' support and policy implementation instruments, the strengthening of an output-basis policy orientation, and with stronger legal framework become the significant aspect for the success of peat and forest permit moratorium policy which is to be extended in another two years and beyond. Another two-year suspension policy by 2015 is quite important to be optimally implemented.

Keywords: moratorium policy, deforestation, forest degradation, GHGs emission, policy implementation

Iwan Hermawan (P3DI Setjen DPR-RI)

AN ANALYSIS OF IMPACT OF UREA AND TSP FERTILIZER SUBSIDY POLICY ON PADDY PRODUCTION AND ACHIEVEMENT OF FOOD SELF-SUFFICIENCY IN INDONESIA

JEKP, Vol. 5 No. 1, June 2014, pp. 63-78

Abstract

One of the important issues in the Ministerial Conference of the members of the World Trade Organization (WTO) in Bali is the granting of subsidies on agricultural policy which is closely related to food security. Although until now the impact of fertilizer subsidy policy is still debated. The purpose of this research is to analyse the impact of subsidy policy changes of Urea and TSP fertilizer on agricultural production close to food self-sufficiency, particularly paddy. Econometrics approach with 2SLS method and time series data from 1990-2013 were applied to answer the purpose of this research. The fertilizer subsidy policy transmission to the paddy and rice economy simultaneously was constructed dynamically. The results showed that if the fertilizer subsidy policy increases, in accordance with Bali packages agreement, the acreage, production, and productivity of paddy will rise. So the paddy self-sufficiency could be achieved according to the targets set by the government. But when the fertilizer subsidies repealed the self-sufficiency of paddy will fail to be realized, both in the period of 2014 and by 2017. This indicates an important role of fertilizer prices of paddy as incentives in production. Pricing policy, either the paddy price or rice price, hasn't been able to temper the decline in the paddy and rice production. Based on these findings the fertilizer subsidy policy is still needed to achieve self-sufficiency of paddy. On the other hand the removal of fertilizer subsidy policy could also be a viable option when dealing with efforts to reduce the fiscal burden, but must be followed with improvements supporting sectors as infrastructure and logistics.

Keywords: Bali package, paddy, policy, fertilizer subsidy, simultaneous equations

Rafika Sari (P3DI Setjen DPR-RI)

FISCAL DECENTRALIZATION POLICY ON DISADVANTAGED REGIONS IN INDONESIA

JEKP, Vol. 5 No. 1, June 2014, pp. 79-99

Abstract

Fiscal decentralization policy is introduced in order to improve the quality of public services in the regions. Special Allocation Fund (DAK), a form of fiscal transfers to local governments, aims to reduce national and regional fiscal imbalances. The increasing DAK as an affirmative action for disadvantaged regions give effect to both economic growth and the alleviation of disadvantaged regions. This study is aimed to determine the financial characteristics and the condition of fiscal decentralization in disadvantaged regions, and DAK influence on their economic growth in 2010-2012. This study uses both quantitative and qualitative analysis. The quantitative methods used are the analysis of financial capability and independence ratio of disadvantaged regions, and comparasion of DAK and economic growth per capita of disadvantaged regions. The population used in this study are 183 disadvantaged regions in Indonesia in 2010-2012. The study result shows that the level of fiscal decentralization in disadvantaged regions are very low, and the increase of the DAK allocation did not give significant relationship to the welfare of their people.

Keywords: fiscal decentralization, disadvantaged region, special allocation fund, fiscal transfer, economic growth

Rasbin (P3DI Setjen DPR-RI)

ECONOMIC SECTORS' NON PERFORMING LOANS IN INDONESIA

JEKP, Vol. 5 No. 1, June 2014, pp. 101-111

Abstract

Indonesian economy continues to grow in the middle of global economic crisis. Those growing sectors are from non tradable sector. In addition, the credit in 2013 slowed compared to that of the preceeding years such as agriculture, electricity, water and gas, and construction sector so that the contribution to credit growth in these sectors have decreased. On the other hand, the number of bad loans/non-performing loan (NPL) remained increasing. One viable way to increase the contribution of economics sectors to the growth of Indonesian economy is by pressing the NPL in the economic sectors. The main purpose of this research is to identify the factors that influence the NPL experienced by economic sectors in Indonesia during the period of 2005-2013. We use Dynamic Panel Data (DPD) and covering the use of difference generalized method of moment (GMM) and System GMM estimation. The estimation result proves that there is a positive relationship between NPL and its lagged value, which indicates the NPL is persistent. Other empirical results found in this study are a positive relationship between NPL and interest rate and sectoral economic growth but the effect of sectoral economic growth is not significant. In addition, this study only finds a negative relationship between NPL and credit growth.

Keywords: *Non Performing Loans, dynamic model, panel data, GMM estimation*

Gusti Azis (Bogor Agricultural University), **Hermanto Siregar** (Bogor Agricultural University),

Adler H. Manurung (Bogor Agricultural University), dan **Evita H. Legowo** (Swiss German University)

GAS RE-ALLOCATION POLICY ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

JEKP, Vol. 5 No. 1, June 2014, pp. 113-130

Abstract

In 2010, the Indonesian government has changed the purpose of natural gas utilization, from export oriented to focusing more on accomodating the need of natural gas for domestic industries to encourage national natural gas production growth and create a greater multiplier effect for the economy. Unfortunately, this policy brings a dilemma to the government as the foreign exchange rate that could be obtained from exporting gas decreases. The objectives of this research are (1) analyzing the development and dynamic of gas industry, (2) analyzing economic factors that influence the supply and demand of gas, and, (3) analyzing impact of economic policies and other economic factors in respect to the utilization of natural gas. The accomplish those purposes, the following was conducted descriptive analysis approach and econometric approach in the form of simultaneous equations. The economic approach that was used is the Two Stage Least Squares (2SLS) method and the use of time series data from year 2000 to 2011. The results of this study show that the main factor which influences the dynamic of gas production is the global gas price as well as in Indonesia. Meanwhile, export of Indonesia gas in response to the elastic or flexible gas production in the long run shows a potential gas resource development in Indonesia that may even more encourage the export of gas. On the other hand, factors that influence the demand of gas by Indonesian Electrical Company and industrial urea fertilizers are differ to each other. However, subsidies became a strong influential facet in term of boosting the gas demand from both industries. Results of the simulation shows that compared to other policies, gas reallocation policies could increase domestic demand for gas as well as encouraging economic growth at the same time. However, this condition becomes disincentive to the development of gas production in Indonesia.

Keywords: *natural gas, economic growth, reallocation policy, simultaneous equations*